

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOMITMEN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)

Oleh:

Fandra Yovano Syafrion

Pembimbing: Zirman dan Azhari

*Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : fandrayovanosy@gmail.com*

The Effect of the Intern Control System, Local Financial Management, Organization Commitment and Organization Culture on the Implementation of Good Governance

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the intern control system, local financial management, organization commitment and organization culture on the implementation of good governance of local government in Solok City. It was a quantitative research utilizing a primary data which were obtained from questionnaire. The population of the study involved all units of local devices found in Solok City. The selection of the sample used purposive sampling methods with the characteristics of employees who perform the function of accounting / financial administrators, power users budget and budget users. There were about 100 respondents selected as the samples of the study, consisting of Chief SKPD, Secretary, Head of finance or the Head of administration and finance staff in each SKPD Solok City. The data were analyzed by using a multiple regression. The results of this study found that the intern control system, local financial management, organization commitment and organization culture has positive significant effect on the implementation of good governance with significant < 0.05.

Keyword: good governance, intern control, financial management, organization commitment, organization culture

PENDAHULUAN

Good governance merupakan sebuah inovasi dalam sistem tata kelola pemerintahan saat ini. Menurut UNDP, *good governance* dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan.

Mardiasmo (2009:25) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip

partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Fakta yang terlihat sebagai bukti lemahnya penerapan *good governance* adalah masih terjadinya kasus korupsi yang terbilang tinggi. Masalah-masalah inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perekonomian yang baik di Indonesia, sehingga semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia dan juga semakin banyaknya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengenai Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2014 semester II, dijelaskan bahwa tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 berada pada opini WTP artinya tata kelola pemerintahan sudah berjalan dengan baik, sedangkan pada pemerintahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 berada pada opini WTP DPP dan pada tahun 2013 terjadi penurunan opini menjadi WDP. Dimana seharusnya dalam penerapan *good governance* opini yang diberikan BPK seharusnya tetap dan terus membaik bukan sebaliknya yang mengalami penurunan opini.

Banyak faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance* pada implementasinya di dalam pemerintahan daerah, yaitu Sistem Pengendalian Intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi penerap *good governance* adalah sistem pengendalian intern, Sistem

pengendalian intern adalah suatu sistem yang diterapkan oleh pimpinan disuatu instansi/organisasi untuk bisa mengontrol instansi/organisasi tersebut dalam proses untuk mencapai tujuan instansi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan kepada peraturan (Mardiasmo, 2009: 208).

Faktor kedua yang menentukan keberhasilan dari penerapan *good governance* di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2006:30).

Dalam perkembangan era reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pemerintah daerah sekarang mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau urusan. Untuk itu Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya faktor ketiga yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus ditunjang dengan komitmen seseorang terhadap organisasinya. Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal. Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik. Dimana komitmen organisasi yang kuat dalam individu akan menyebabkan individu berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi (Wiratno, 2013).

Apabila pegawai/pimpinan yang berada pada Instansi sudah berkomitmen dalam mencapai sasaran terhadap pelayanan publik yang sesuai dengan penerapan *good governance*, maka hal tersebut akan mudah dilakukan karena semua keinginan pegawai/pimpinan sudah mantap dan akan menghasilkan kinerja yang baik dalam Instansi tersebut. Hal inilah yang akan mewujudkan *good governance*.

Dan faktor terakhir yang mempengaruhi penerapan *good governance* adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem yang mempengaruhi cara karyawan dalam bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaan dan cara bekerja dengan karyawan lainnya. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para karyawan, sehingga jika budaya organisasi pada suatu organisasi atau instansi baik, maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula (Morita, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok? 2) Apakah terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok? 3) Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok? 4) Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok. 2) Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok. 3) Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok. 4) Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Good Governance

Good governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan,

mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan Negara yang berkaitan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.

Ada pun UNDP memberikan karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi:

- a. Partisipasi (*Participation*)
- b. Aturan Hukum
- c. Tansparansi
- d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
- e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
- f. Berkeadilan
- g. Efektivitas dan Efisiensi
- h. Akuntabilitas
- i. Bervisi Strategi

Didalam pelaksanaannya, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) juga mempunyai konsep yang harus di capai. Menurut Bapenas (2007) konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 14 konsep, yang karakteristiknya sebagai berikut:

- a. Prinsip tata pemerintahan yang berwawasan kedepan
- b. Prinsip tata pemerintahan yang bersifat terbuka
- c. Prinsip tata pemerintahan yang cepat tanggap
- d. Prinsip pemerintahan yang akuntabel
- e. Prinsip tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi

- f. Prinsip tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumberdaya secara efektif dan efesien
- g. Prinsip tata pemerintahan yang terdesentralisasi
- h. Prinsip tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada consensus
- i. Prinsip tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat
- j. Prinsip tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat
- k. Tata pemerintahan yang menjunjung supermasi hukum
- l. Prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan
- m. Prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada dasar
- n. Prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup.

Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dalam PP No 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern yang selanjutnya disebut dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Gerry (2013) Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
4. Pengawasan

Menurut Domai (2002) dalam Depi (2013) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah :

1. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
2. Perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya. Setiap anggaran daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan.
3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan

4. Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh pemerintah daerah
5. Untuk menampung dan menganalisis serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Komitmen Organisasi

Menurut (Robbins, 2008: 69) dalam perilaku organisasi, komitmen organisasi merupakan komponen dari perilaku. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya itu. Keterlibatan seseorang yang tinggi dalam suatu pekerjaan berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.

Menurut Sopiah (2008) komitmen organisasi dapat disimpulkan sebagai suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya:

- a. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi
- b. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi
- c. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi

Selanjutnya Meyer dan Allens dalam Sopiah (2006:249) mengemukakan bahwa terdapat 3 komponen model dari komitmen organisasional, diantaranya:

- a. *Affective commitment*
- b. *Continuance commitment*
- c. *Normative commitment*

Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah sebuah sistem yang mempengaruhi cara karyawan dalam bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaan dan cara bekerja dengan karyawan lainnya.

Robbins (2008: 248) memberikan karakteristik budaya organisasi sebagai berikut:

1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko,
2. kecermatan, analisis dan perhatian kepada rincian.
3. Berorientasi kepada hasil,
4. Berorientasi kepada manusia,
5. Berorientasi kepada tim
6. Agresifitas,

Menurut Rivai (2006) dalam Joko (2013) budaya melakukan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu:

1. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lain.
2. Budaya memberikan identitas bagi anggota organisasi.
3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dan pada kepentingan individu.
4. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial.
5. Budaya memandu serta membentuk sikap dan perilaku pegawai.

Kerangka Pemikiran

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan *Good Governance*

Pengendalian intern dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan kepada peraturan (Mardiasmo, 2009: 208).

Jadi bisa dikatakan jika sistem pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan baik akan memberikan efisien dan efektif dalam operasi, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, asset milik negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan sebaik-baiknya maka akan terciptalah tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Maka dapat dirumuskan hipotesis :

H1: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Governance* pada SKPD Kota Solok.

b. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Suatu instansi/organisasi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan menghasilkan (dari tahap perencanaan hingga pelaporan)

pelaporan keuangan daerah yang andal dan relevan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Arso, 2012 dalam Ruspina, 2013).

H2: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Governance* pada SKPD Kota Solok.

c. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*

Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik, dengan begitu maka pemerintah daerah akan menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan penerapan *Good Governance* di daerahnya.

Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan bekerja secara maksimal karena keinginannya akan kesuksesan organisasi tempat dimana mereka bekerja. Dengan adanya komitmen yang kuat, mereka akan bekerja lebih keras, ikhlas, dan memiliki rasa peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja mereka karena visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan sumbangsih yang mereka berikan dan akan berdampak pada penerapan *Good Governance*. Komitmen organisasi merupakan dorongan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi.

H3: Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan

terhadap penerapan *Good Governance* pada SKPD Kota Solok.

d. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*

Budaya organisasi adalah sebuah sistem yang mempengaruhi cara karyawan dalam bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaan dan cara bekerja dengan karyawan lainnya.

Budaya organisasi akan membentuk karakteristik pegawai yang berkerja di dalam sebuah Instansi. Dengan budaya organisasi yang baik maka akan terciptalah karakteristik yang baik pada pegawai tersebut. Apabila karakteristik yang terbentuk baik, maka sebuah Instansi akan mudah melakukan penerapan *Good Governance* pada Instansinya.

H4: Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Governance* pada SKPD Kota Solok.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada Kota Solok. Untuk sampelnya menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dimana seluruh SKPD yang terdapat di Kota Solok dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melakukan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan, sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran pada SKPD Pemerintah Kota Solok yang berjumlah 25 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 4 responden yaitu Kepala SKPD, Sekretaris, Kasubag keuangan atau Kasubag tata usaha dan staf

keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden.

Jenis penelitian ini adalah penelitian primer dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebar kepada 100 responden yang mewakili 25 SKPD yang ada di Kota Solok.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel independen. Pada penelitian ini, variabel dependen yaitu penerapan *good governance* (Y), sedangkan variabel independen terdiri dari system pengendalian intern (X1), pengelolaan keuangan daerah (X2), komitmen organisasi (X3), dan budaya organisasi (X4).

Good governance adalah suatu tata kelola pemerintah yang baik, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan tersebut. Variabel diukur dengan kuesioner model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Tanpa Pendapat, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. *Good governance* dengan indikator partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, bervisi strategi. Instrument yang digunakan terdiri dari 13 (tiga belas) item pertanyaan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu sistem yang diterapkan oleh pimpinan disuatu instansi/organisasi untuk bisa mengontrol instansi/organisasi tersebut dalam proses untuk mencapai tujuan instansi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel diukur dengan kuesioner model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Tanpa Pendapat, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Instrumen yang digunakan terdiri dari 22 (dua puluh dua) item pertanyaan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Variabel diukur dengan kuesioner model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Tanpa Pendapat, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Instrumen yang digunakan terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan.

Komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas seseorang pada suatu organisasi dan juga proses yang berkelanjutan dimana seseorang mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi. Variabel diukur dengan kuesioner model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Tanpa Pendapat, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Instrumen yang digunakan terdiri dari 12 (dua belas) item pertanyaan.

Budaya organisasi adalah sebuah sistem yang mempengaruhi cara karyawan dalam bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaan dan cara bekerja dengan karyawan lainnya. Variabel diukur dengan kuesioner model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Tanpa Pendapat, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Instrumen yang digunakan terdiri dari 11 (sebelas) item pertanyaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai r table diperoleh dengan persamaan $N-2 = 82-2 = 80 = 0.217$. Tingkat signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0.217. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid jika r hitung > r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013:53).

Hasil Uji Reliabilitas Data

Tabel 1
Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha
Sistem Pengendalian Intern	0.890
Pengelolaan Keuangan Daerah	0.756
Komitmen Organisasi	0.862
Budaya Organisasi	0.722
Penerapan <i>Good Governance</i>	0.789

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas instrumen sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi, budaya organisasi dan penerapan *good governance* antara lain 0.890, 0.756, 0.862, 0.722, 0.789. Dari semua nilai kelima variabel tersebut menunjukkan bahwa

koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas data dengan Uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test* di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.787 yang lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dikatakan data residual berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem Pengendalian Intern	0.206	4.865	Tidak terdapat Multikolonieritas
Pengelolaan Keuangan Daerah	0.386	2.588	Tidak terdapat Multikolonieritas
Komitmen Organisasi	0.295	3.393	Tidak terdapat Multikolonieritas
Budaya Organisasi	0.361	2.773	Tidak terdapat Multikolonieritas

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 3
Uji Autokorelasi

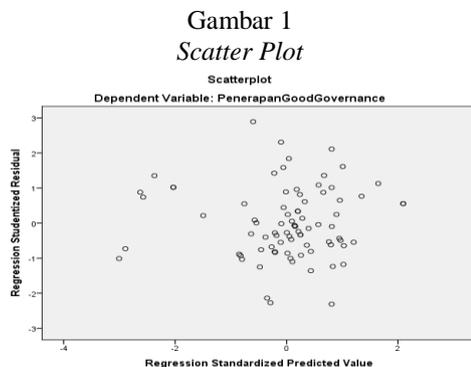
N	dU	dL	Durbin Watson
82	1.745	1.541	2.196

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil Durbin Watson menunjukkan angka 2.196. Nilai dU dengan $k = 4$ dan $n = 82$ menunjukkan angka 1,745 maka dapat disimpulkan tidak terjadi

autokorelasi dimana $dU < d < (4-dU)$
 $= 1.745 < 2.196 < 2.255$.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari *scatterplot* terlihat titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y dengan bentuk yang tidak teratur, dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan *Good Governance*

Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan *good governance* digunakan uji statistik t. Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4:

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.236 > 1.991$ dan $sig. 0,028 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 4
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan *Good Governance*

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Sistem Pengendalian Intern	2.236	1.991	0.028

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance* pemerintahan daerah Kota Solok.

Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pengendalian intern yang baik maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan asset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan kepada peraturan. Sehingga akan terciptalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

b. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap penerapan *Good Governance*

Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* digunakan uji statistik t. Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5
Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap penerapan *Good Governance*

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Pengelolaan Keuangan Daerah	2.254	1.991	0.014

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.254 > 1.991$ dan $sig. 0.014 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance* pemerintah daerah Kota Solok.

Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang

telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku akan menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang andal dan relevan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga disimpulkan apabila pengelolaan keuangan suatu daerah telah berjalan dengan baik maka akan terwujudlah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada daerah tersebut.

c. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*

Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan *good governance* digunakan uji statistik t. Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 6:

Tabel 6
Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Komitmen Organisasi	5.890	1.991	0.000

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5.890 > 1.991$ dan $sig.0.000 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance* pemerintah daerah Kota Solok.

Hal ini membuktikan bahwa komitmen yang tinggi akan

mempengaruhi situasi kerja yang professional, dengan situasi kerja yang professional akan berdampak pada meningkatnya capaian sasaran instansi/organisasi terhadap pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya efektif efisien, bervisi strategis, berorientasi pada hasil dan transparansi. Dengan meningkatnya pelayanan publik disuatu daerah tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah itu telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

d. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*

Untuk menguji pengaruh Budaya organisasi terhadap penerapan *good governance* digunakan uji statistik t. Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 7
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	sig
Budaya Organisasi	2.843	1.991	0.006

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.843 > 1.991$ dan $sig.0.006 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance* pemerintah daerah Kota Solok.

Hal ini membuktikan bahwa budaya organisasi bisa membentuk karakteristik pegawai yang berkerja di

dalam suatu pemerintahan. Dengan budaya organisasi yang baik maka akan melekatlah sikap yang baik pada pegawai tersebut. Apabila pegawai pada suatu pemerintahan telah bersikap dengan baik maka hal ini akan menguntungkan pemerintahan tersebut, karena pegawai yang bekerja di dalamnya tidak akan melakukan penyelewengan atau akan patuh terhadap hukum undang-undang yang berlaku. Apabila kondisi itu telah terwujud maka pemerintahan daerah tersebut lebih mudah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi, budaya organisasi terhadap terhadap penerapan *good governance*. Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*. 2) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*. 3) Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*. 4) Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian antara lain : 1) Objek dalam

penelitian ini dibatasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok. Hal ini menyebabkan memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian apabila penelitian dilakukan menambah atau mengganti pada objek dan daerah penelitian yang berbeda. 2) Pemahaman dan keseriusan dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang kurang dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden. 3) Variabel independen yang digunakan terbatas pada sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi, dan budaya organisasi organisasi.

Saran

Beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain: 1) Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya dengan menggunakan sampel SKPD yang ada di beberapa kabupaten atau kota. 2) Penelitian selanjutnya agar memasukkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan *good governance* (misalnya, auditor internal, pengawasan DPRD, dan sebagainya). 3) Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi. 4) Melengkapi metode dengan wawancara karena peneliti menemukan adanya perbedaan antara jawaban di kuesioner dan jawaban secara lisan untuk pernyataan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapenas, 2007, Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007, diterbitkan oleh Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BPK, 2014, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Depi Oktia Ruspina, 2013, Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang), Jurnal Universitas Negeri Padang, Padang.
- Gerry Armando, 2013, *Pengaruh Sistem pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukittinggi)*, Jurnal Universitas Negeri Padang, padang.
- Ghozali, Imam. 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresil*, edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Habibie, 2013, *Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan*
- Peran Auditor Internal Terhadap Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Solok)*, Jurnal Universitas Negeri Padang, Padang.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah., 2006, *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)* (on-line) available at <http://www.google.com>
- Joko Agustri Sonni, 2013, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Kota Padang)*, Jurnal Universitas Negeri Padang, Padang.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Morita Indah Lestari, 2013, *Pengaruh Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Umum di Kota Padang)*, Jurnal Universitas Negeri Padang, Padang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang sistem pengendalian internal
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Robbins, 2008, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat.

Sari, Eka Nurmala, 2012, *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan)*, Jurnal, Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara, Bandung.

Sugiyono, 2014, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Sujana, Edy, 2014, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)*, Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.

Sopiah, 2008, *Perilaku Organisasional*, Yogyakarta: Andi Offset.

Wiratno, Adi, 2013, *Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja*,

Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

-----, Kemitraan Partnership for Governance Index 2012

-----, United National Development Program

www.menpan.go.id